



RENCANA STRATEGIS

DIREKTORATPENDIDIKAN ANAK USIA DINI

2020-2024

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya Rancangan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020-2024 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Rancangan Rencana Strategis Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (Renstra Direktorat PAUD) disusun mengacu kepada (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005-2025; (c) Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; (d) Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan (e) Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen) Tahun 2020-2024.

Renstra ini akan menjadi dasar dan pedoman dalam menyusun: (1) Rencana Kerja Tahunan (RKT); (2) Perjanjian Kinerja (PK); (3) Rencana Aksi; (4) Program dan kegiatan pelayanan PAUD secara terukur dan terarah; dan (5) Laporan Kinerja. Selain itu, Renstra ini menyajikan sasaran, target dan strategi pencapaiannya yang dilakukan melalui peningkatan mutu dan akses layanan PAUD yang didukung dengan kerangka implementasi dan perkiraan kebutuhan biaya penyelenggaraan PAUD yang merata dan berkualitas dalam kurun waktu 2020-2024, mekanisme pemantaun dan evaluasi, serta pengendalian program untuk penjaminan mutu dan memastikan bahwa penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien.

Jakarta, 2020
Direktur Pendidikan Anak Usia Dini

Muhammad Hasbi

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	3
1.2 Permasalahan dan Potensi	6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	14
2.1 Visi Direktorat PAUD	14
2.2 Misi Direktorat PAUD	17
2.3 Tata Nilai Direktorat PAUD	17
2.4 Tujuan Direktorat PAUD	20
2.5 Sasaran Program Direktorat PAUD	21
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	23
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PAUD	23
3.2 Kerangka Regulasi.....	23
3.5 Kerangka Kelembagaan.....	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN	30
4.1 Target Kinerja	30
4.2 Kerangka Pendanaan	32
BAB V PENUTUP	34
Referensi	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pendidik PAUD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.1	Tujuan Direktorat PAUD	21
Tabel 2.2	Program dan Sasaran Program (SP) Direktorat PAUD	22
Tabel 3.1	Arah dan Kebutuhan Regulasi Kemendikbud	25
Tabel 4.1	Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat PAUD Tahun 2020-2024	30
Tabel 4.2	Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat PAUD periode 2020-2024	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019	4
Gambar 1.2	Pertumbuhan Lembaga PAUD 2015-2019	4
Gambar 1.3	Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD	5
Gambar 1.4	Analisis Permasalahan dan Potensi dengan Balance Scorecard	6
Gambar 1.53	Perbandingan APK PAUD dengan negara-negara lain	7
Gambar 1.6	Data Satu Desa Satu PAUD	8
Gambar 1.7	Data Pendidik PAUD Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 2.1	Profil Pelajar Pancasila	14
Gambar 3.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat PAUD	28

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memegang peranan yang penting bagi perkembangan seorang anak. Berbagai hasil penelitian di bidang ilmu psikologi dan pendidikan menunjukkan bagaimana stimulasi yang diberikan pada jenjang PAUD akan berdampak positif terhadap perkembangan sosial, emosi, kognitif, bahasa dan juga moral seorang anak. Anak yang memperoleh stimulasi sejak dini akan memiliki prestasi akademis yang cenderung lebih baik di masa yang akan datang.

PAUD juga memiliki peranan yang penting dalam pembangunan sebuah bangsa. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan keempat: "memastikan pendidikan bermutu yang inklusif dan berkesetaraan dan menyediakan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua", secara spesifik mencantumkan kesetaraan akses terhadap layanan PAUD berkualitas sebagai sebuah indikator pembangaun bangsa. Hal ini menunjukkan terdapatnya ortodoksi global akan pentingnya PAUD dalam menentukan arah pembangunan sebuah negara.

Penelitian yang memenangkan Hadiah Nobel oleh Heckman (2011) memperkuat ortodoksi tersebut dengan menyimpulkan bahwa program PAUD yang komprehensif, mulai dari lahir hingga usia 5 tahun, dapat menghasilkan pengembalian ekonomi yang lebih tinggi daripada yang program prasekolah yang hanya melayani anak usia 3 hingga 4 tahun. Namun demikian, Heckman (2011: 33) mengingatkan bahwa "... anak yang kurang beruntung secara ekonomi dan kemudian memperoleh pendidikan keluarga yang buruk jauh lebih dirugikan daripada anak dengan latar belakang ekonomi yang sama tapi memperoleh pendidikan keluarga yang berkualitas tinggi". Dengan kata lain, pendidikan keluarga yang berkualitas merupakan elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari program PAUD.

Di Indonesia, telah dikembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan akses dan mutu PAUD. Dalam kerangka peraturan, PAUD di Indonesia didefinisikan sebagai "suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut" (Undang-Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Untuk memastikan penyediaan dan

penyelenggaraan PAUD berkualitas, Pemerintah Indonesia telah merumuskan standar nasional PAUD, yang dirumuskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Nomor 137/2014. Baru-baru ini, sebagai bentuk komitmen terhadap Agenda Pendidikan 2030, pemerintah juga telah membuat inisiatif terobosan dengan meluncurkan wajib satu tahun pendidikan pra-sekolah dasar untuk semua anak Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 59/2017).

Terlepas dari komitmen global dan nasional, dan berbagai langkah terobosan yang telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD dalam periode yang lalu (2015-2019), terdapat beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan untuk arah dan kebijakan strategis pengembangan PAUD nasional selanjutnya. Hal-hal tersebut meliputi kemajuan teknologi, perkembangan pandemi COVID 19, dan perubahan paradigma pendidikan global.

Pertama, kemajuan teknologi mendorong terwujudnya berbagai terobosan di segala sektor kehidupan manusia. Baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya, berbagai kata kunci seperti otomatisasi, kecerdasan buatan, *big data*, *3D printing* dan lain sebagainya terus menjadi jargon yang didengungkan. Sektor pendidikan pun tak luput dari pesatnya perkembangan teknologi ini. Terlepas dari argumentasi dan asumsi antara Revolusi Industri 4.0 atau Masyarakat 5.0, layanan PAUD di Indonesia perlu memanfaatkan sekaligus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang terjadi.

Kedua, pandemi COVID 19 telah menjadikan mengubah wajah pendidikan di dunia dan Indonesia. Hidup dan kehidupan lebih dari 50 juta anak dan keluarga di Indonesia berubah selamanya. Namun demikian, semua lapisan dan masyarakat peduli pendidikan di Indonesia menolak untuk menghentikan pembelajaran. Para guru dan tenaga kependidikan bekerja tanpa lelah untuk mempersiapkan pembelajaran jarak jauh untuk setiap peserta didik di mana pun mereka berada. Sejalan dengan antisipasi pertama sebelumnya, layanan PAUD perlu mengupayakan terwujudnya prasyarat pembelajaran pada periode disrupsi ini, yaitu: infrastruktur digital, perangkat digital, kurikulum digital, dan pengembangan profesional.

Ketiga, senada dengan antisipasi pertama dan kedua, paradigma pendidikan global telah berubah. Melihat apa yang telah terjadi di berbagai belahan dunia, sistem pendidikan telah selamanya berubah. Keluarga dan pendidik mengalami proses

kegiatan belajar mengajar yang baru. Alat, teknik, dan inovasi baru telah dan akan terus ditemukan, digunakan, dan dialami.

Dengan mempertimbangkan tiga antisipasi di atas, Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini berupaya merangkul semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan antara lain keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa demi mewujudkan layanan PAUD berkualitas bagi seluruh anak Indonesia. Rencana strategis (Renstra) Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020-2024 berfokus pada kebijakan pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan PAUD sebagai pondasi bagi pembangunan Sumber Daya Manusia dalam menata dan memaksimalkan bonus demografi yang menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yang dicita-citakan oleh para Pendiri Bangsa.

Bab I ini menjelaskan tentang gambaran umum dan analisis permasalahan di Direktorat PAUD. Bab ini terdiri atas dua bagian, dimulai dari kondisi umum disertai hasil evaluasi dari renstra sebelumnya. Selanjutnya, penjelasan tentang beragam permasalahan dan analisisnya dengan metode *balance scorecard*.

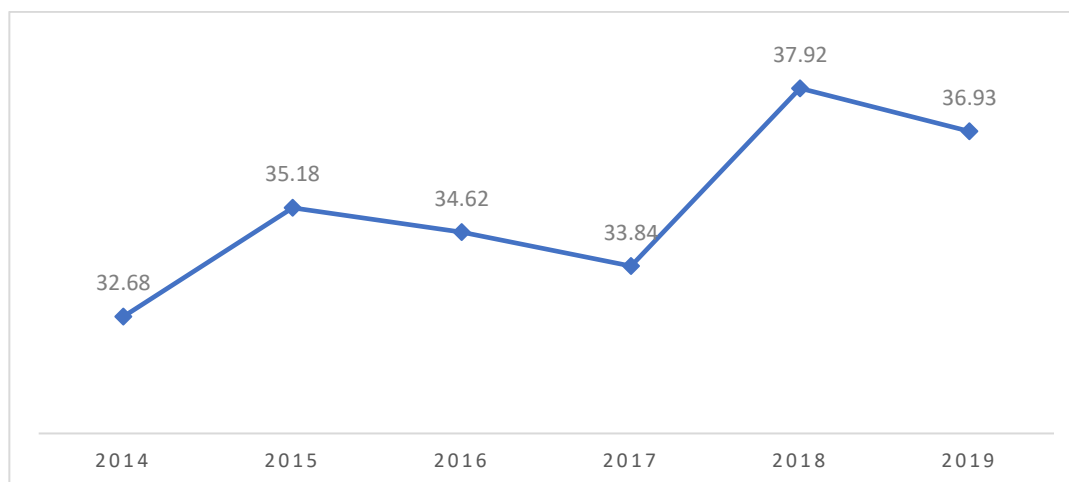
1.1 Kondisi Umum

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan kunci keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Anak usia dini yang dibekali dengan pendidikan yang berkualitas memiliki kecerdasan sosio-emosional, dan kesiapan sekolah yang lebih baik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa PAUD memiliki dampak jangka panjang, dan bahkan turut memberi imbal hasil pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Heckman, 2011; Waber dkk, 2007; OECD, 2017).

A. Angka Partisipasi PAUD

Jumlah anak yang menikmati layanan PAUD terus bertambah setiap tahun. Hal ini tercermin dari tingkat angka partisipasi kasar (APK), atau jumlah anak yang menikmati layanan PAUD di suatu daerah. Capaian ini merupakan kerja bersama antara pemerintah, masyarakat dan swasta.

Gambar 1.1 Capaian APK PAUD Tahun 2015-2019



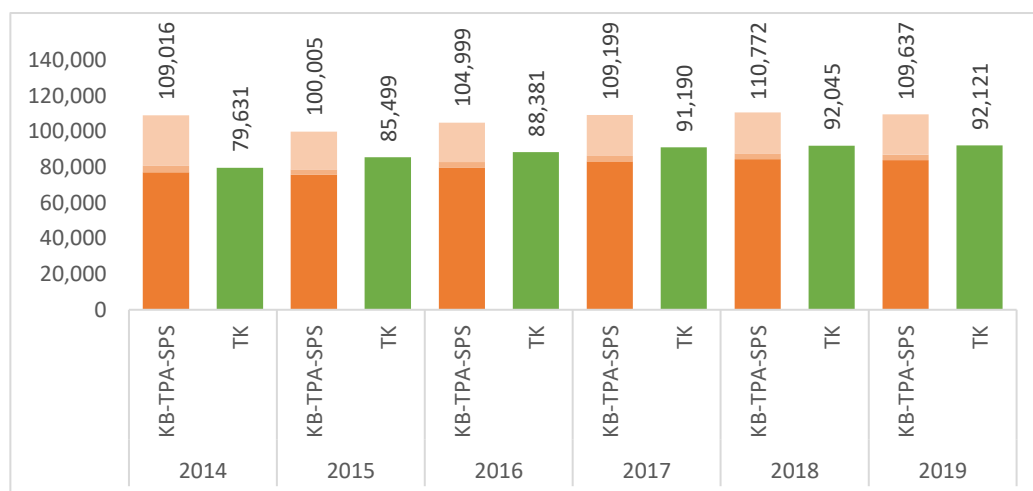
Sumber: [Biro Pusat Statistik](#), 2020

Program-program yang telah dijalankan untuk meningkatkan APK PAUD seperti Gambar 1.1 di atas adalah: (1) Bantuan RKB PAUD; (2) Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD; (3) Bantuan PAUD untuk layanan khusus atau daerah marginal; dan (4) Bantuan PAUD pasca bencana dan tanggap darurat. Program-program tersebut mendorong tumbuhnya lembaga PAUD sebagaimana dilukiskan di Gambar 1.2.

B. Pertumbuhan Lembaga PAUD

Dari sisi jumlah, lembaga PAUD di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahun (Lihat Gambar 1.2).

Gambar 1.2 Pertumbuhan Lembaga PAUD 2015-2019



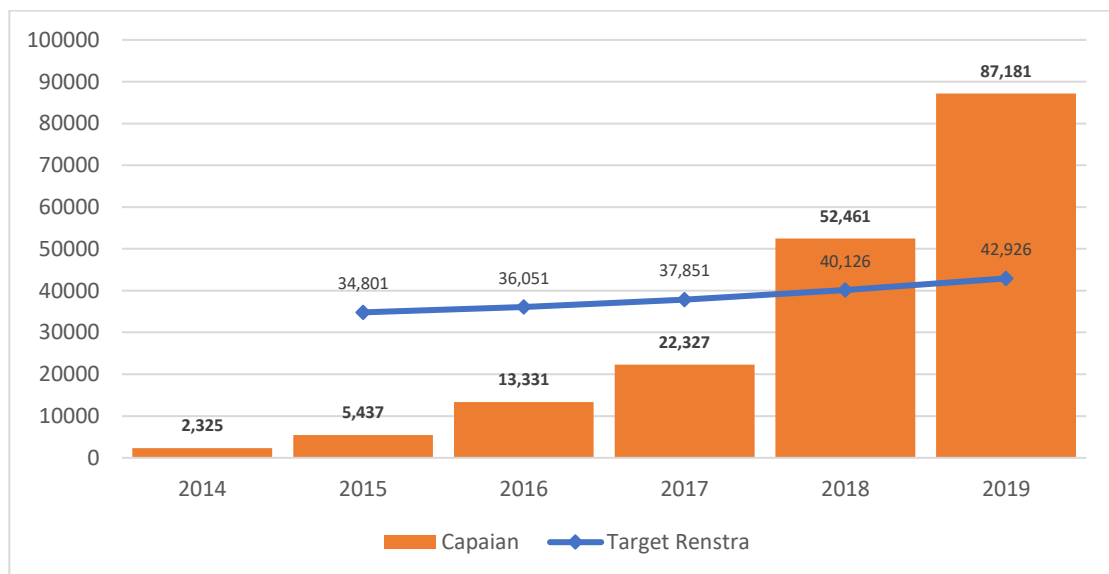
Sumber: Dapo PAUD-Dikmas, 2019

Pemerintah terus mendorong setiap kota/kabupaten memiliki Lembaga PAUD terpadu pembina holistik integratif (PAUD HI), yang bekerja sama dengan Posyandu agar pelayanan kepada anak usia dini memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan, dan gizi. Dorongan ini sesuai dengan Perpres No. 60 Tahun 2013, dan Permen Kemenko PMK sebagai Ketua Pokja PAUD HI. Di tahun 2019, sudah 91,4% kabupaten/kota memiliki Lembaga tersebut.

C. Mutu PAUD

Pemerintah terus berupaya meningkatkan mutu PAUD. Beragam upaya dilakukan, misalnya melalui akreditasi satuan PAUD dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga PAUD dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD-PNF.

Gambar 1.3 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD



Sumber: Laporan Kinerja 2019

Secara jumlah peningkatan Lembaga PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas kali lipat antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga, maka rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2015-2019 adalah 103% per tahun.

1.2 Permasalahan dan Potensi

Walau telah terjadi peningkatan dalam angka partisipasi pendidikan dan pemerataan mutu pendidikan, masih terdapat permasalahan dalam upaya memajukan pendidikan anak usia dini. Bagian ini akan membahas permasalahan PAUD dan dianalisis dengan metode balance scorecard. Metode ini dipilih karena cukup efektif mengukur kinerja sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam skala besar. Metode ini memiliki empat perspektif yakni Misi, Proses internal, sumber daya organisasi, dan anggaran.

Gambar 1.4 Analisis Permasalahan dan Potensi dengan Balance Scorecard



Sumber: Diadaptasi dari Kaplan & Norton (1992)

A. Layanan kepada Masyarakat

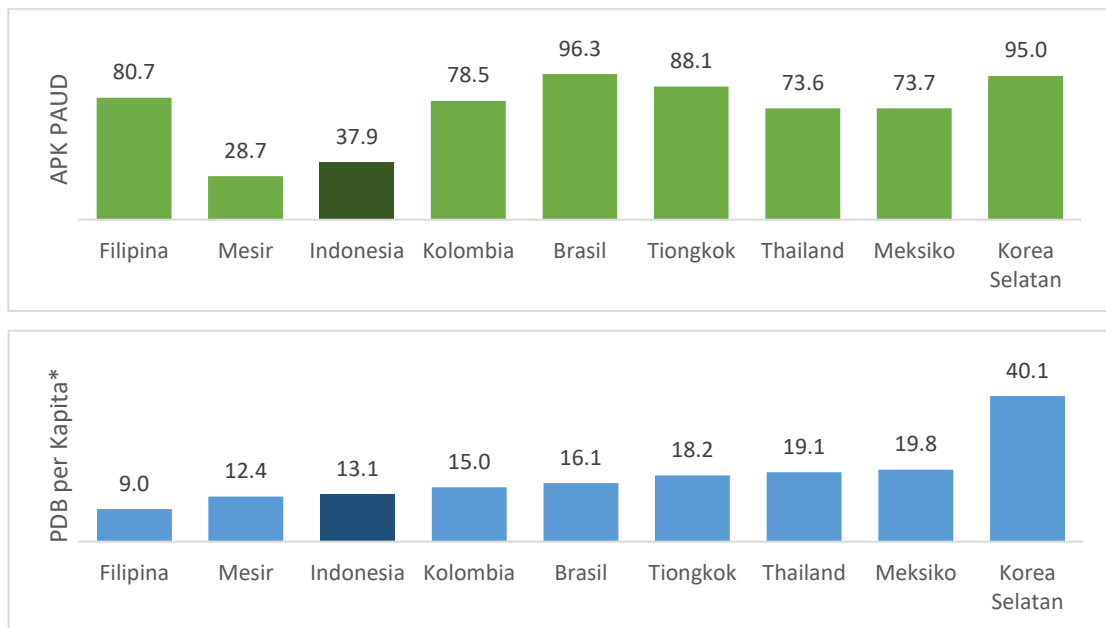
Salah satu tugas Direktorat PAUD adalah meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan akses dan kualitas PAUD. Sejumlah permasalahan atau tantangan yang dihadapi adalah rendahnya angka partisipasi.

Angka Partisipasi PAUD

Angka partisipasi PAUD Indonesia masih jauh dibanding negara-negara lain.

Gambar 1.53 menyandingkan angka partisipasi PAUD dengan pendapatan perkapita sejumlah negara.

Gambar 1.53 Perbandingan APK PAUD dengan negara-negara lain



Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuan dolar AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000

Sumber: Dokumen Roadmap Pendidikan, 2020

Seperti terlihat dalam

Gambar 1.53, angka partisipasi PAUD Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih dari 70%. Adapun angka partisipasi PAUD Indonesia berada di bawah 40%.

Dibandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki Gross Domestic Product (GDP) lebih rendah seperti Filipina dan Mesir, Indonesia memang telah memiliki angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan tetapi, Indonesia tidak bisa berpuas diri dan telah berketetapan untuk menjadi negara maju, sehingga memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan baik.

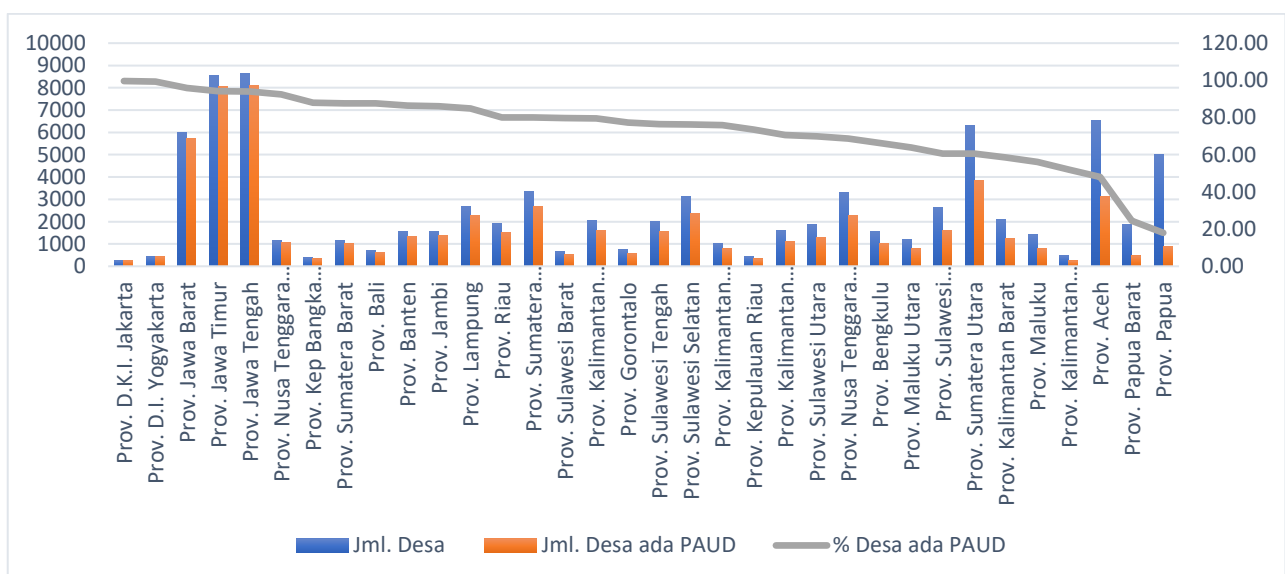
Oleh karena itu, acuan Indonesia haruslah negara-negara yang lebih maju. Dibandingkan dengan Kolombia, negara berkembang lain dengan GDP yang sedikit lebih tinggi dari Indonesia, dengan selisih kurang dari 20%, terlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi PAUD. Angka partisipasi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD Indonesia (37,9%).

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD di Indonesia. Pertama, kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi anak usia dini (golden years) masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30% atau 25.000 desa di Indonesia yang belum memiliki lembaga PAUD.

Pemerataan Akses

Akses layanan PAUD di Indonesia belum merata. Masih banyaknya desa yang belum terlayani PAUD. Ini merupakan tantangan tersendiri dalam rangka peningkatan dan pemerataan akses layanan PAUD. Berdasar data yang ada, sampai tahun 2020 masih terdapat 22.629 (26,85%) desa yang belum memiliki PAUD. Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat belum mencapai 50% dari jumlah desa

Gambar 1.6 Data Satu Desa Satu PAUD



Sumber: Dapo PAUD dan Dikmas, 2020

B. Sumber Daya Organisasi

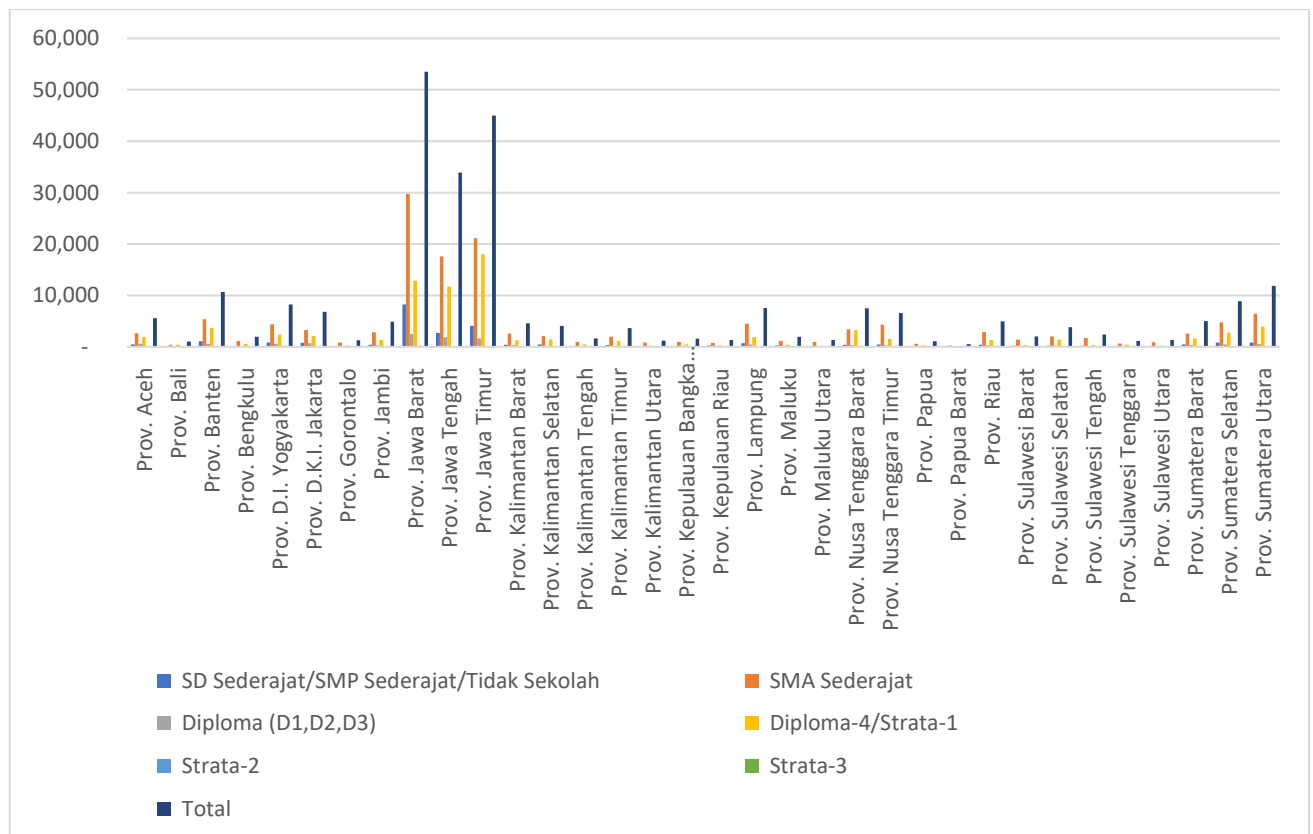
Sumber daya adalah hal terpenting dalam peningkatan kinerja Direktorat PAUD. Sumber daya ini terkait dengan peningkatan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.

Indonesia memiliki pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kerap bekerja tanpa pamrih dan nimbalan. Hal ini merupakan permasalahan yang kita hadapi bersama, namun ini sekaligus menjadi potensi dan modal sumber daya manusia yang besar untuk memajukan PAUD di Indonesia.

Pendidik PAUD

Hingga tahun 2020, jumlah pendidik PAUD yang secara resmi tercatat di Dapo PAUD Dikmas mencapai 541.400 orang. Dari jumlah tersebut, 44,28% di antaranya hanya berpendidikan SMA ke bawah dan terbanyak merupakan pendidik PAUD nonformal (68,58%). Ini merupakan tantangan besar, karena sesuai Standar Nasional PAUD, pendidik PAUD mestinya berpendidikan S-1 atau D-4. Data selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran.

Gambar 1.7 Data Pendidik PAUD Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 1.1 Data Pendidik PAUD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Provinsi	SD Sederajat/SMP Sederajat/Tidak Sekolah	SMA Sederajat	Diploma (D1,D2,D3)	Diploma-4/Strata-1	Strata-2	Strata-3	Total
Prov. Aceh	448	2,645	557	1,909	11	-	5,570
Prov. Bali	88	404	108	415	3	-	1,018
Prov. Banten	1,091	5,364	564	3,632	22	-	10,673
Prov. Bengkulu	166	1,137	92	572	4	-	1,971
Prov. D.I. Yogyakarta	805	4,383	596	2,391	39	-	8,214
Prov. D.K.I. Jakarta	747	3,236	686	2,110	54	-	6,833
Prov. Gorontalo	91	851	26	286	-	-	1,254
Prov. Jambi	394	2,851	279	1,354	4	-	4,882
Prov. Jawa Barat	8,216	29,718	2,512	12,831	201	5	53,483
Prov. Jawa Tengah	2,713	17,560	1,863	11,703	80	1	33,920
Prov. Jawa Timur	4,101	21,152	1,615	18,011	117	1	44,997
Prov. Kalimantan Barat	378	2,592	310	1,280	13	-	4,573
Prov. Kalimantan Selatan	491	2,078	101	1,394	12	-	4,076
Prov. Kalimantan Tengah	169	980	79	433	5	1	1,667
Prov. Kalimantan Timur	348	1,944	175	1,156	18	1	3,642
Prov. Kalimantan Utara	128	822	44	221	8	-	1,223
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	120	937	52	459	-	-	1,568
Prov. Kepulauan Riau	274	775	39	267	2	-	1,357
Prov. Lampung	699	4,490	486	1,875	15	1	7,566
Prov. Maluku	284	1,171	87	426	15	-	1,983
Prov. Maluku Utara	108	942	120	174	5	-	1,349
Prov. Nusa Tenggara Barat	429	3,413	337	3,290	19	-	7,488
Prov. Nusa Tenggara Timur	450	4,306	266	1,510	12	-	6,544
Prov. Papua	132	602	67	281	3	-	1,085
Prov. Papua Barat	109	281	23	125	2	-	540
Prov. Riau	426	2,906	273	1,341	8	-	4,954
Prov. Sulawesi Barat	191	1,424	77	343	1	-	2,036
Prov. Sulawesi Selatan	232	2,002	216	1,383	14	-	3,847
Prov. Sulawesi Tengah	206	1,716	84	354	5	-	2,365
Prov. Sulawesi Tenggara	55	636	85	368	5	-	1,149
Prov. Sulawesi Utara	131	914	23	239	5	-	1,312
Prov. Sumatera Barat	443	2,608	310	1,650	9	-	5,020
Prov. Sumatera Selatan	844	4,775	455	2,746	34	-	8,854
Prov. Sumatera Utara	855	6,459	554	3,951	44	-	11,863
Jumlah	26,362	138,074	13,161	80,480	789	10	258,876

Sumber: Dapo PAUD dan Dikmas, 2020

Tenaga Kependidikan PAUD

Tenaga kependidikan untuk PAUD adalah Kepala sekolah, pengelola, penyelenggara, pengawas TK, penilik PAUD, dan pengasuh serta penjaga di satuan PAUD. Mereka adalah bukan PNS, kecuali pengawas TK atau Penilik PAUD. Di lembaga PAUD nonformal, sebagian besar tenaga kependidikan merupakan tenaga sukarela. Jikalau ada yang mendapatkan gaji, jumlahnya sangat tidak memadai.

Penilik dan Pengawas PAUD

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (Permenpan RB, 2010). Tugas pokok penilik adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program. Sedangkan Pengawas PAUD bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendali mutu PAUD di wilayah yang menjadi tugasnya.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai Direktorat PAUD

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan motor penggerak Direktorat PAUD. Sejumlah upaya telah dilakukan untuk membangun sistem kepegawaian yang baik. Peralihan sebagian besar jabatan struktural administrasi menjadi jabatan fungsional tentu berdampak pada organisasi. Butuh penyesuaian dan adaptasi dari seluruh pegawai.

Beragam upaya yang dilakukan Direktorat PAUD dalam pengembangan karir dan kompetensi ASN adalah dengan Pendidikan dan Pelatihan atau yang biasa dikenal dengan istilah Diklat. Output utama dari pelaksanaan Diklat adalah untuk menghasilkan SDM internal yang berkualitas dan memiliki kompetensi guna mendukung manajemen pelaksanaan tugas Direktorat PAUD. Sejumlah diklat teknis telah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi teknis yang diperlukan sebagai ASN. Diklat teknis ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan karir PNS agar sejalan dengan kebutuhan perkembangan organisasi. Diklat yang telah diikuti para pegawai antara lain Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diklat keuangan, perencanaan dll. Namun, salah satu permasalahan yang dihadapi adalah minimnya jumlah pegawai usia produktif di Direktorat PAUD.

Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pegawai Direktorat PAUD merupakan salah satu amanat reformasi birokrasi bidang kepegawaian. Direktorat akan terus berupaya wewujudkan pelaksanaan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance). ASN Direktorat PAUD memiliki peran strategis dalam peningkatan layanan PAUD kepada masyarakat.

Seluruh ASN di Direktorat PAUD harus mampu bekerja lebih profesional, andal, bersikap disiplin, jujur, adil dan tranparan dalam melaksanakan tugas.

C. Proses Internal

Dalam proses internal, terdapat dua permasalahan yang harus diatasi bersama yaitu:

Penguatan sinergi antarpegawai

Perubahan nomenklatur membawa dampak kepada para pegawai. Direktorat PAUD beralih dari Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Masyarakat menjadi Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Koordinasi dan sinkronisasi program dengan Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD juga menjadi tantangan tersendiri. Sebab upaya peningkatan layanan PAUD tidak akan terlepas dari peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan.

Pemutakhiran data

Data mempunyai fungsi yang sangat penting dalam perencanaan, dan pengambilan kebijakan. Ia ibarat kompas yang memandu arah. Pemutakhiran data PAUD harus terus dilakukan agar dapat dijadikan dasar penetapan kebijakan, termasuk penetapan alokasi anggaran. Namun, banyak pengelola satuan pendidikan yang masih enggan melakukan pemutakhiran data di Dapodik. Padahal data induk tersebut merupakan sistem pendataan terpadu di sektor pendidikan. Oleh karena itu, seluruh lembaga harus terus melakukan pemutakhiran.

D. Anggaran

Selama ini alokasi anggaran PAUD masih belum sebanding dengan jumlah sasaran yang ada. Anggaran Direktorat PAUD sejak 2008 s.d. 2019 rerata di bawah Rp 1 triliun, padahal jumlah anak 3-6 tahun pada tahun 2019 mencapai 6.423.286 anak (Dapo PAUD dan Dikmas, 20 Mei 2020). Anggaran Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD pun mengalami nasib serupa, rerata kurang dari Rp 1 triliun. Jumlah ini pun sebagian besar

diperuntukkan bagi tunjangan guru TK. Data selengkapnya tentang anggaran PAUD tersebut dapat diperiksa pada Tabel 4 (terlampir).

Hal ini cukup ironis, sebab fakta riset menunjukkan bahwa investasi PAUD memberikan imbal hasil tertinggi. Riset di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa setiap satu dolar yang diinvestasikan untuk PAUD memberikan imbal hasil atau *return of investment* sebesar 13% per tahun. Selain itu, dalam jangka panjang, PAUD yang berkualitas dapat menekan tingkat pengangguran dan tingkat kriminalitas (Heckman, 2011). Oleh karena itu, permasalahan anggaran ini harus diatasi dengan cara melakukan efisiensi anggaran dan menentukan prioritas.

Salah satu strategi yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala keterbatasan anggaran adalah dengan mendorong inisiatif pemerintah daerah dan swasta. Oleh karena itu, Direktorat PAUD harus menjalin kemitraan atau kerja sama untuk mengembangkan program PAUD di Indonesia. Ini adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah tidak dapat bergerak seorang diri, butuh peran serta swasta, organisasi mitra, perusahaan BUMN dan BUMD, serta masyarakat.

Kerja sama antara Direktorat PAUD dengan organisasi mitra dalam negeri juga perlu terus dijalin dan diperkuat untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu layanan PAUD. Kerja sama dapat dibangun dan diperkuat dengan berbagai pengurus Pusat PKK, Dharma Wanita, Kowani, HIMPAUDI, dan IGTKI. Selain itu, Kemendikbud juga bekerja sama dengan organisasi keagamaan seperti Dewan Masjid Indonesia, Majelis Pendidikan Kristen, dan lain sebagainya. Kerja sama dengan organisasi mitra ini sangat bermanfaat, sebab organisasi ini memiliki pengurus hingga ke tingkat kecamatan, bahkan desa. Melalui kerja sama ini, program PAUD diharapkan dapat tersebar hingga ke pelosok desa.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

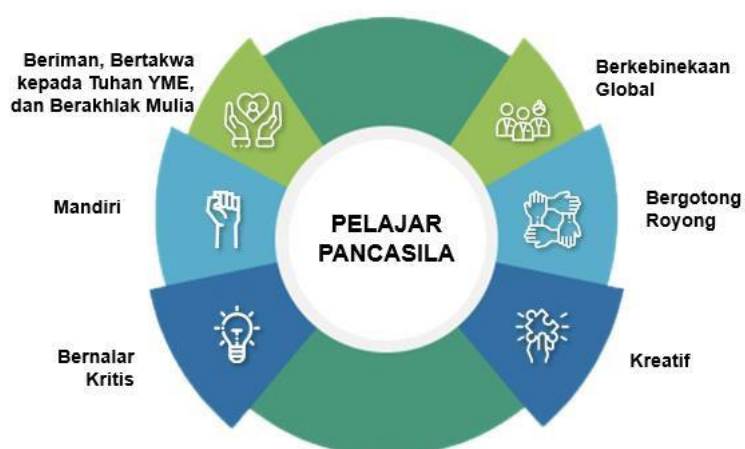
2.1 Visi Direktorat PAUD

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen, Direktorat PAUD memiliki komitmen untuk menjalankan dan mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia pada RPJMN Tahun 2020-2024, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Direktorat Jenderal, yaitu:

“Mewujudkan pendidikan anak usia dini yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global.”

Visi tersebut di atas mencerminkan komitmen Direktorat PAUD Kemendikbud dalam mendukung visi dan misi Presiden. PAUD merupakan modal penting dalam pembangunan generasi emas di bidang pendidikan yang akan membawa anak-anak Indonesia mencapai puncak prestasi dan karakter.

Gambar 2.1 Profil Pelajar Pancasila



Sejalan dengan perwujudan visi dan misi Presiden tersebut, Direktorat PAUD juga berkomitmen untuk menciptakan Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Keenam ciri tersebut dijabarkan sebagai berikut:

A) Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia

Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia: (a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan (e) akhlak bernegara.

B) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan.

C) Bergotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi.

D) Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

E) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

F) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keenam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila, yang adalah fondasi bagi segala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas budaya Indonesia dan nilai-nilai Pancasila yang berakar dalam, masyarakat Indonesia ke depan akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan global - dapat menerima dan memanfaatkan keragaman sumber, pengalaman, serta nilai-nilai dari beragam budaya yang ada di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khususnya.

2.2 Misi Direktorat PAUD

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Direktorat PAUD berkomitmen menjalankan Misi Presiden atau Nawacita kedua, yaitu Peningkatan kualitas manusia Indonesia; Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Direktorat PAUD selaras dengan misi Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen, Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua, yakni:

- a. Mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- b. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan anak usia dini.

2.3 Tata Nilai Direktorat PAUD

Tata nilai merupakan pemandu arah sikap dan perilaku seluruh pegawai Direktorat PAUD. Tata nilai ini harus dilaksanakan sesuai dengan tata nilai Kemendikbud 2020-2024, yaitu:

A. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Adapun indikator yang mencerminkan nilai integritas adalah:

- a. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam tindakan;
- b. Jujur dalam segala tindakan;
- c. Menghindari benturan kepentingan;
- d. Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- e. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- g. Tidak melanggar sumpah dan janji pegawai/jabatan;
- h. Tidak melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; dan,

- i. Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan.

B. Kreatif dan inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif adalah:

- a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru:
- b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan:
- c. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif;
- d. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah;
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien;
- f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai;
- g. Tidak bersikap tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan.
- h. Tidak monoton

C. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu. Indikator dari nilai inisiatif adalah:

- a. Responsif melayani kebutuhan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi;
- c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah;
- d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atasan dan
- e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegagalan, berargumentasi bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggota tim.

D. Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan kompetensi dan profesionalisme. Indikator yang menunjukkan nilai pembelajar adalah:

- a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman;
- b. Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannya pelajaran;
- c. Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja;
- d. Memanfaatkan waktu dengan baik;
- e. Suka mempelajari hal yang baru; dan,
- f. Rajin belajar/bertanya/berdiskusi.

E. Menjunjung meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

- a. Berkompetisi secara profesional;
- b. Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai;
- c. Memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional sesuai kinerja;
- d. Tidak sewenang-wenang;
- e. Tidak mementingkan diri sendiri;
- f. Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensinya; dan,
- g. Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme.

F. Terlibat aktif

Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Nilai terlibat aktif terlihat dari indikator:

- a. Terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan misi kementerian;
- b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja;
- c. Peduli dengan aktivitas lingkungan sekitar (tidak apatis);
- d. Tidak bersifat pasif, sekadar menunggu perintah.

G. Tanpa pamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknya pegawai Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujuan bersama. Indikator nilai tanpa pamrih adalah:

- a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan;
- b. Rela membantu pekerjaan rekan kerja lainnya;
- c. Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan santun);
- d. Tidak melakukan pekerjaan dengan terpaksa; dan
- e. Tidak berburuk sangka kepada rekan kerja.

2.4 Tujuan Direktorat PAUD

Perumusan tujuan ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan besar Direktorat PAUD pada tahun 2020-2024 adalah: **“Melakukan transformasi non-reversibel pada Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia”**. Tujuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan dan kebudayaan Indonesia harus mengalami transformasi perbaikan total agar dapat menghadapi tantangan Abad 21, dan tidak boleh lagi berjalan ke arah sebaliknya, yang akan berarti kemunduran bangsa. Tujuan besar ini diejawantahkan dalam empat tujuan sebagaimana dapat dilihat di **Error! Reference source not found.1**.

Direktorat PAUD memiliki tujuan yang selaras dengan tujuan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Tabel 2.1 Tujuan Direktorat PAUD

No.	Tujuan
1.	Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2.	Penguatan mutu Pembelajaran Pendidikan anak usia dini yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3.	Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4.	Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

2.5 Sasaran Program Direktorat PAUD

Sasaran Direktorat PAUD selaras dengan tujuan pembangunan Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, yaitu:

- 1) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** — Perluasan akses pendidikan anak usia dini yang bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya akses PAUD.
- 2) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** — Penguatan mutu Pembelajaran Pendidikan anak usia dini yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah:
 - a. Meningkatnya **kualitas layanan** PAUD.
 - b. Meningkatnya **Mutu satuan pendidikan** jenjang PAUD
- 3) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah meningkatnya karakter peserta didik.
- 4) Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** — Penguatan sistem tata kelola pendidikan anak usia dini yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah:
 - a. Terwujudnya **tata kelola** yang berkualitas.
 - b. Terwujudnya **pengelolaan pendidikan** yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang PAUD.

Berikut ini keenam sasaran program pendidikan anak usia dini.

Tabel 2.2 Program dan Sasaran Program (SP) Direktorat PAUD

No.	Program/Sasaran Program (SP)	Tujuan terkait
1.	Program Dukungan Manajemen	
SP.1.1	Terwujudnya tata kelola yang berkualitas	4
2.	Program Kualitas Pengajaran & Pembelajaran	
SP.2.3	Meningkatnya kualitas layanan PAUD	2
3.	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	
SP.3.1	Meningkatnya Perluasan Akses PAUD	1
SP.3.2	Meningkatnya mutu satuan PAUD	2
SP.3.3	Meningkatnya Karakter Peserta Didik	3
SP.3.4	Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang PAUD	4

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat PAUD

Arah kebijakan dan strategi Direktorat PAUD pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi pada pendidikan anak usia dini, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui (1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya, (2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan, (3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan, serta (4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Direktorat PAUD 2020-2024 bertujuan meningkatkan akses dan kualitas. Strategi tersebut yaitu,

- 1) Penguatan kebijakan PAUD yang berpusat pada anak. Direktorat mengembangkan standar capaian belajar yang menitikberatkan pada kreativitas anak.
- 2) Kampanye nasional perubahan paradigma tentang PAUD. Direktorat akan mengajak para guru dan orang tua agar menitikberatkan pada konsep *play-based learning*, bermain, bukan menekankan anak PAUD pada baca tulis hitung (calistung).
- 3) Memacu peningkatan kualitas PAUD dengan melakukan pendampingan integrasi layanan kesehatan, gizi, dan perlindungan anak.
- 4) Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam program PAUD, sebab peran serta keluarga akan sangat menentukan keberhasilan program PAUD.

- 5) Peningkatan akses PAUD melalui program Satu Desa Satu PAUD.
- 6) Memperkuat peran pemerintah daerah, swasta, BUMN/BUMD dan para Bunda PAUD untuk mengembangkan program PAUD hingga ke berbagai daerah.
- 7) Melakukan pemutakhiran sistem data PAUD yang terpadu, transparan, dan akuntabel
- 8) Memperjuangkan peningkatan anggaran PAUD di daerah.

3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada periode waktu tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Arah dan Kebutuhan Regulasi Kemendikbud

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait	Target Penyelesaian
1	<p>Masukan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>(Sumber : Renstra Kemdikbud 2020-2024 Permendikbud 22/2020)</p>	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan pendidikan serta sinkronisasi dengan peraturan perundang undangan lain antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan kembali jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 2. Pembagian wewenang penyelenggaraan pengelolaan pendidikan. 3. Standar pendidikan 4. muka/<i>online</i>). 5. Kurikulum, guru, asesmen pembelajaran, penyelenggaraan pendidikan oleh negara asing. 	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar 	<p>Tahun 2021</p>
2	<p>Masukan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p>	<p>Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian kewenangan penyelenggaraan pendidikan. 2. Keterlibatan orang tua dalam PAUD 	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pusat Penguatan Karakter 3. Kementerian Kesehatan 4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak 	<p>Tahun 2022</p>
3	<p>Masukan Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.</p>	<p>Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyesuaian kebijakan data terpadu di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 	<p>Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. BAN PAUD dan PNF 	<p>Tahun 2021</p>

		2. Penyusunan penyelenggaraan data sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.			
4	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Satuan Pendidikan Kerja Sama, mengubah/mencabut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia	Menyesuaikan substansi pengaturan dengan perkembangan kebijakan pendidikan saat ini. Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Syarat pendirian SPK; 2. Mekanisme pendirian SPK; 3. Pemenuhan Standar dan pembinaan; 4. Akreditasi SPK	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. BAN PAUD dan PNF	Tahun 2020
5	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus pada Jalur Formal	Hal-hal yang menjadi fokus perubahan yaitu: 1. Ruang lingkup pendidikan khusus. 2. Penyelenggaraan pendidikan khusus. 3. Pendidikan untuk peserta didik penyandang disabilitas. 4. Pendidikan untuk peserta didik cerdas istimewa. 5. Pendidikan untuk peserta didik bakat istimewa. 6. Tanggungjawab pembiayaan.	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini 2. Direktorat Sekolah Dasar	Tahun 2023
6	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Biaya Satuan Pendidikan	Hal yang menjadi fokus penyusunan yaitu: 1. Jenis biaya satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 2. Sumber pembiayaan. 3. Kewenangan kepala sekolah dalam menetapkan besaran maksimal biaya pungutan. 4. mekanisme pungutan oleh satuan pendidikan. 5. pelaporan penggunaan dana hasil pungutan oleh satuan pendidikan. 6. Sanksi	Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1. Biro Perencanaan dan Penganggaran 2. Direktorat Sekolah Dasar	Tahun 2021

3.3 Kerangka Kelembagaan

A. Tugas dan fungsi

Direktorat PAUD mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan standar, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi penyelenggaraan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan layanan khusus pada pendidikan anak usia dini, serta penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Direktorat PAUD memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) perumusan kebijakan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- 2) perumusan standar di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- 3) pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- 4) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- 5) fasilitasi penyelenggaraan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- 6) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;
- 7) pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada PAUD dan pendidikan layanan khusus pada PAUD;

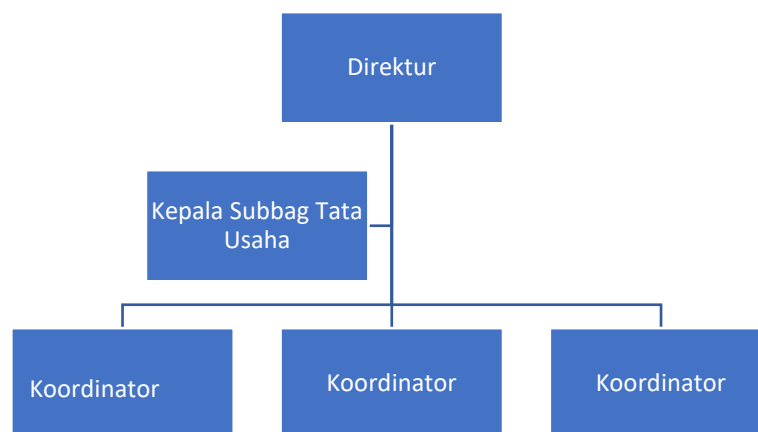
- 8) penyiapan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing; dan,
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat.

B. Struktur organisasi

Struktur organisasi Direktorat PAUD mengalami perampingan sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Hal ini sesuai dengan semangat untuk melakukan efisiensi dan penyederhanaan birokrasi, dengan tetap menjaga pelayanan kepada masyarakat.

Struktur Direktorat PAUD tergambar sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat PAUD



Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Reformasi Birokrasi

Direktorat PAUD berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan secara berkesinambungan terhadap efektivitas birokrasi. Peningkatan reformasi birokrasi merupakan buah dari kerja keras seluruh pegawai. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah tercermin dari perubahan kinerja seluruh pegawai dan komitmen kami untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Kami pun membiasakan para pegawai untuk berpikir di luar

kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box*), membenahi regulasi, memutakhirkan berbagai kebijakan dengan paradigma baru. Serangkaian upaya ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan menciptakan aparatur yang bersih dan sigap melayani.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah mengacu pada kebijakan yang telah digariskan dalam *Roadmap* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Secara bertahap, Direktorat PAUD juga menjalankan delapan program area perubahan Kemendikbud, yakni:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penguatan Pengawasan
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- d. Penguatan Kelembagaan
- e. Penguatan Tata Laksana
- f. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
- g. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

BAB IV

TARGET KINERJA DAN TARGET PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi ditetapkan sasaran kegiatan yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan keluaran (*output*) dari satu atau beberapa kegiatan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran kegiatan dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja kegiatan.

Tabel 4.1 Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target Kinerja Direktorat PAUD Tahun 2020-2024

SK/IKK	Sasaran kegiatan (<i>Output</i>)/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SK	Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata dan berkualitas							
IKK 1	Jumlah Peserta Didik usia 3-6 tahun yang mengikuti menerima BOP PAUD	juta orang	6.4	6.9	7.5	8.1	8.7	9.3
IKK 2	Jumlah Kab/Kota dengan Persentase Siswa Kelas 1 yang melalui TK/RA/BA di atas 50%	kab/kota	51	103	154	206	257	267
IKK 3	Jumlah Kab/Kota dengan APK PAUD (3-6 tahun) di atas 53,1%	kab/kota	84	104	124	144	164	184
IKK 4	Jumlah PAUD yang menjadi Sekolah Penggerak	Lembaga		-	626	776	926	1,076
IKK 5	Nilai rata-rata tingkat pencapaian perkembangan anak (5-6 tahun)	Nilai	2.75	3	3.25	3.5	3.7	4
IKK 6	Persentase PAUD yang memiliki nilai kinerja sekolah (Score Card) minimal 75 (Kategori Sangat Tinggi)	%		-	5.0	10.0	15.0	20.0
IKK 7	Persentase satuan PAUD yang menerapkan evaluasi peserta didik berkembang sesuai harapan	%	-	20	40	55	65	80
IKK 8	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif	%	19	25	35	47	60	75
IKK 9	Persentase data pokok pendidikan PAUD yang akurat, terbaru dan berkelanjutan	%	70.00	80.00	90.00	97.20	97.90	98.90

Sasaran kegiatan tersebut ditetapkan untuk mendukung sasaran program di lingkungan Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, yaitu:

1) Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatnya Perluasan Akses Afiriasi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah serta Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
- b. Jumlah Kab/Kota dengan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan minimum 0.8 (kategori sangat tinggi)
- c. Jumlah Provinsi dengan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan minimum 0.7 (tinggi)

2) Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatnya Mutu satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase satuan pendidikan PAUD yang dipersiapkan terakreditasi minimal B
- b. Persentase Satuan Pendidikan yang dipersiapkan memenuhi akreditasi minimal B
- c. Jumlah Satuan Pendidikan menjadi Sekolah Penggerak

3) Sasaran Program (*Outcome*): Meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
- b. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
- c. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum

4) Sasaran Program (Outcome): Meningkatnya Karakter Peserta Didik

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
- b. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi (tingkat minimum)

5) Sasaran Program (Outcome): Terwujudnya pengelolaan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah

Indikator Kinerja Program:

- a. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
- b. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS-Non-Tunai
- c. Persentase prov/kab/kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
- d. Persentase Data Pokok Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah yang Akurat, Terbaru dan Berkelanjutan

6) Sasaran Program (Outcome): Terwujudnya tata kelola Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah yang berkualitas

Indikator Kinerja Program:

- a. Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah minimal BB
- b. Jumlah Satker yang dibina menuju WBK

4.2 Kerangka Pendanaan

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Rencana Strategis Direktorat PAUD periode 2020-2024

Sasaran Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp Miliar)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini yang merata dan berkualitas	300.43	360.51	396.57	475.88	571.06

BAB V

PENUTUP

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PAUD tahun 2020-2024 ini disusun dalam rangka mewujudkan layanan PAUD yang merata dan berkualitas yang menjadi salah satu fokus pemerintah pada RPJMN IV. Oleh karena itu Renstra ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka: (1) penekanan fokus pada mutu pendidikan; (2) penguatan peran Direktorat PAUD sebagai satuan kerja pusat yang memiliki mandat menyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria untuk diikuti oleh Pemerintah Daerah selaku pelaksana layanan PAUD; (3) penekanan pada program afirmasi terutama akses; dan (4) penguatan akuntabilitas dan transparansi.

Renstra menjabarkan visi beserta rencana sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas sasaran kegiatan yang mendukung sasaran program Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen Kemendikbud, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan untuk digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan PAUD yang hendak dicapai pada periode 2020 – 2024, ataupun sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan PAUD. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memandatkan Renstra merupakan dasar dan acuan dalam menyusun (1) Rencana Kerja Tahunan; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Rencana Aksi; dan (4) Laporan Kinerja Tahunan.

Selain yang diuraikan di atas, Rancangan Teknokratik Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pelaksanaan layanan PAUD, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pelaksanaan layanan PAUD selama lima tahun mendatang.

Referensi

- Heckman, J. (2011) The Economics of Inequality: The Value of Early Childhood Education. *American Educator*, 35, 31-47
- Kaplan, R. and Norton, D. (1992) The Balanced Scorecard—Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, 79.
- Kemendikbud (2014) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Jakarta
- Kemendikbud (2020) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024. Jakarta: Sekretariat Jenderal
- Kemendikbud (2020) Panduan Penyusunan Renstra. Jakarta: Biro Perencanaan
- Kemendikbud (2020) Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Ditjen PAUD, Dikdasmen
- OECD (2017), Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education, Starting Strong, OECD Publishing, Paris: <https://doi.org/10.1787/9789264276253-en>.
- Sekretariat Negara (2004) Undang Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta
- Waber DP, de Moor C, Forbes PW, Almlil CR, Botteron KN, (2007) The NIH MRI study of normal brain development: Performance of a population based sample of healthy children aged 6 to 18 years on a neuropsychological battery. *Journal of the International Neuropsychological Society*. 2007;13(5):729–746.